BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah-satu pasal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tepatnya pada pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” kemudian pada ayat (3) pasal 28H menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan, pada pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Hak atas kesehatan tersebut dituangkan lebih lanjut pada Pasal 5.

Bicara tentang hak, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” adapun dalam pasal 2 “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana

dan tegaknya hak asasi manusia.” Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.”

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan salah satu penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹ Virus ini juga dapat menyerang siapa pun termasuk, lansia (golongan usia lanjut), anak-anak, orang dewasa, dan bayi.² tidak hanya sampai disana, Covid-19 ini juga dapat menginfeksi bentuk kehidupan lain selain manusia, contohnya seperti

---

¹ M. Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu, 2021, Hal. 2.

² *Ibid.*

ayam, babi, sapi, kucing, ferret, kelinci, ular, ikan dan kelelawar.³ Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar di seluruh benua termasuk di benua antartika.⁴ Penyebaran Covid-19 yang masif telah ditetapkan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk di Indonesia sendiri telah tercatat ada sekitar 4.225.871 orang telah dikonfirmasi terjangkit Covid-19, 4.057.760 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 142.560 orang dinyatakan Meninggal.⁵

Menangani hal tersebut beberapa negara membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan jumlah korban infeksi dari virus mematikan tersebut dan mencegah penyebaran virus Covid-19, di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan dalam rangka mencegah penyebaran diantaranya adalah dengan pemberlakuan kebijakan antara lain;

1. Karantina Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,

---

³ Wasito Dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus: Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis Dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan Dan Manusia*, Cet. 1, Lily Publisher, Yogyakarta, 2020, Hal. 19-25

⁴ Pandasurya Wijaya, "*Virus Corona Akhirnya Sampai Ke Benua Antartika*", Merdeka, <https://www.merdeka.com/dunia/virus-corona-akhirnya-sampai-ke-benua-antartika.html> Diakses Pada 19:25 Wib, 8 Oktober 2021.

⁵ Covid19.Go.Id, "*Peta Sebaran Covid-19*", <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> Diakses Pada 17:55 Wib, 8 Oktober 2021.

2. *Physical Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta,
4. Melalui program vaksinasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang kemudian pada peraturan tersebut mengalami perubahan sebanyak tiga kali dengan diundangkannya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 kemudian Peraturan Presiden No.50 Tahun 2021 dan yang terakhir pada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2022

Akan tetapi, tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sanksi dapat diberikan kepada setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak mengikuti Vaksinasi Covid-19, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan

atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Adapun ketentuan dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya kemudian pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut menyalahi aturan di atasnya (*lex superior derogat legi inferiori*),

Maka dari penjelasan di atas dapat di ringkas kembali bahwa ada beberapa peraturan yang bertentangan dengan pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban vaksinasi, diantaranya yaitu;

1. Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

2. Pasal 41 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
3. Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Akan tetapi Pemenuhan hak tersebut dapat menjadi kewajiban bagi setiap orang dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan pada pasal 9 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan kewajiban tersebut meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap orang.⁶

Namun demikian, upaya untuk mencapai target vaksinasi dengan mewajibkan vaksinasi yang mengedepankan sanksi administratif belum tentu berhasil. Justru, ini dapat mengundang reaksi balik (*backlash*) dan memperparah pertentangan dari kelompok anti-vaksin.

---

⁶ Puteri Hikmawati, "Perlukah Sanksi Bagi Orang Yang Menolak Divaksin Covid-19?", *Parliamentary Review* No. 1, Vol. 3 Edisi Maret 2021, Hal. 14.

Sebagaimana kita ketahui pula Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi Covid-19 dan beberapa produk hukum yang ditetapkan memuat sanksi yang terkesan memaksa masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi pemerintah dalam aturannya, seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mana di dalam peraturan tersebut diatur jika seseorang yang menolak pemberian vaksinasi akan/dapat dikenakan sanksi administrasi. Memang vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut tentu membuat kontroversi di kalangan masyarakat justru malah meragukan kebijakan pemerintah dan akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Badan *World Health Organization* (WHO) bahkan pernah mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi tidak diwajibkan untuk seluruh populasi, bahkan Amerika Serikat dan Perancis pun tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19 ini.⁷

---

⁷ Thea Fathanah Arbar, "Terungkap, As Sampai Prancis Tidak Mewajibkan Vaksin Covid-19", Cnbc Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210309150045-4-228951/terungkap-as-sampai-prancis-tidak-mewajibkan-vaksin-covid-19> Diakses Pada 23:20 Wib, 8 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi sanksi administrasi dalam peraturan tentang kewajiban vaksinasi tersebut?
2. Bagaimana kedudukan sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi sanksi administrasi dalam peraturan tentang kewajiban vaksinasi tersebut.
2. Untuk mengetahui kedudukan sanksi administrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam hal yang berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan program vaksinasi pemerintah dalam mencegah Covid-19 menyebar secara luas.

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi solusi dalam masalah yang berkaitan dalam program vaksinasi pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis dan untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.⁸ Pemahaman Sanksi Administratif penting dalam penelitian Hukum Administrasi Negara, karena di dalamnya menyangkut efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, prosedur penerapan sanksi dan mengukur apakah norma-norma Hukum Administrasi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat.⁹

2. Peraturan Perundang-undangan

---

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

⁹ Dr. Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 304.

Konsep tentang Undang-Undang dapat ditelusuri dalam segi materil maupun dalam segi formil.¹⁰ Undang-Undang dalam arti materil dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan Undang-Undang dalam arti formil adalah lazim disebut Undang-Undang saja¹¹

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh sebagai upaya pencegahan primer penyakit¹²

4. Pandemi

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Zoonosis menyatakan bahwa Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka yang dimaksud dengan “Pengaturan Sanksi Administrasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019” adalah

---

¹⁰ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal. 6.

¹¹ A. Rosyid Ai Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, Hal. 13.

¹² M. Rifaldi, *Op.Cit.*, Hal. 86.

Mempelajari dari segi hukum tentang Sanksi Administrasi bagi siapa pun yang menolak pemberian vaksin dalam rangka pemerintah dalam menanggulangi penyakit Corona yang telah menginfeksi orang di seluruh dunia.

F. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat bahwa beberapa teori yang penulis jadikan sandaran dalam melakukan penelitian ini

1. Teori Pembentukan Perundang-undangan

Dalam melakukan pembentukan teori perundang-undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan.¹³ Menurut Michael Frans Berry dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan” menyimpulkan bahwa;

“Teori Pembentukan teori perundang-undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut.”¹⁴

2. Teori Sanksi Hukum Administrasi

---

¹³ Michael Frans Berry, "*Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*", *Muhammadiyah Law Review* No. 2, Vol. 2 Edisi Juli 2018, Hal. 90.

¹⁴ *Ibid.*

Menurut J.B.J.M. ten Berge, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan pendapat J.B.J.M. ten Berge sebelumnya, telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi.¹⁵ Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi yang diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁷ Jenis kegiatan penelitian ini tidak diperlukan fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau

---

¹⁵ Dr. Ridwan Hr, *Op.Cit.*, Hal. 298.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 98.

fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.¹⁹ Penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana landasan pembuatan dan regulasi sanksi administrasi terhadap pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.

3. Alat Pengumpulan Penelitian

Alat pengumpulan yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan cara mengambil dari buku-buku pustaka yang terkait dengan masalah yang sudah diperoleh dan disusun oleh penulis.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

---

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 87.

¹⁹ *Ibid.*

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.²⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - 4) Peraturan Presiden no.14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
  - 6) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/MENKES/PER/VIII/1989 Tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin),

---

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 181.

hasil penelitian hukum, yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab III Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang bagaimana uraian mengenai Peraturan Presiden no.14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019

Bab IV Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.